



PERAN SISTEM INFORMASI KEIMIGRASIAN DALAM MENINGKATKAN KEPATUHAN IZIN TINGGAL WNA

**Nurul Maharani Piranti¹, Muhammad Fadhil², Imam Al Kindi³, Muhammad Akbar
Novianto⁴, Muhammad Arsyad Albanjari⁵, Leonardo Oktaviano Rendu⁶**
nurulpiranti20@gmail.com¹, mfadhil3238@gmail.com², imamkotabumi39@gmail.com³,
noviantoakbar354@gmail.com⁴, m.arsyadalbanjari88@gmail.com⁵, leonardo.0viano@gmail.com⁶
Politeknik Imigrasi

Abstract

Increased global mobility encourages the need for an efficient and adaptive immigration system, especially in managing foreign residence permits (WNA). One of the main challenges facing the Directorate General of Immigration is the low level of compliance with residence permit provisions, such as cases of overstay or abuse of permits. This study aims to analyze the role of immigration information systems including SIMKIM, e-Visa, and automatic warning systems in increasing compliance with WNA residence permits in Indonesia. Using a qualitative descriptive approach through literature studies and documentation analysis, this study found that immigration information systems have a significant contribution in increasing transparency, efficiency, and accuracy of supervision of residence permits. In addition, digitizing services provides WNA with easy access to renew and monitor the status of their permits. However, some obstacles such as integration between systems that are not yet optimal and the limitations of digital literacy in users are still obstacles in the overall application of technology. This research recommends strengthening technology infrastructure, training for officers, and increasing education to the COLA as a strategic step to maximize the role of information systems in supporting immigration compliance.

Keywords: *Immigration Information System, Compliance, Stay Permit, Cola, Digital Technology.*

Abstrak

Peningkatan mobilitas global mendorong perlunya sistem keimigrasian yang efisien dan adaptif, terutama dalam mengelola izin tinggal warga negara asing (WNA). Salah satu tantangan utama yang dihadapi Direktorat Jenderal Imigrasi adalah rendahnya tingkat kepatuhan terhadap ketentuan izin tinggal, seperti kasus overstay atau penyalahgunaan izin. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem informasi keimigrasian termasuk SIMKIM, e-Visa, dan sistem peringatan otomatis dalam meningkatkan kepatuhan izin tinggal WNA di Indonesia. Dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi literatur dan analisis dokumentasi, penelitian ini menemukan bahwa sistem informasi keimigrasian memiliki kontribusi signifikan dalam meningkatkan transparansi, efisiensi, dan akurasi pengawasan izin tinggal. Selain itu, digitalisasi layanan memberikan kemudahan akses bagi WNA dalam memperbarui dan memantau status izin mereka. Namun, beberapa kendala seperti integrasi antar sistem yang belum optimal serta keterbatasan literasi digital pada pengguna masih menjadi hambatan dalam penerapan teknologi secara menyeluruh. Penelitian ini merekomendasikan penguatan infrastruktur teknologi, pelatihan bagi petugas, serta peningkatan edukasi kepada WNA sebagai langkah strategis untuk memaksimalkan peran sistem informasi dalam mendukung kepatuhan keimigrasian.

Kata Kunci: Sistem Informasi Keimigrasian, Kepatuhan, Izin Tinggal, WNA, Teknologi Digital.

PENDAHULUAN

Perkembangan Globalisasi telah meningkatkan mobilitas negara secara signifikan, termasuk masuknya warga negara asing (WNA) ke Indonesia dengan berbagai tujuan seperti pariwisata, Pendidikan, bisnis, dan pekerjaan. Dalam konteks ini, sistem keimigrasian memegang peranan penting dalam menjaga kedaulatan negara sekaligus memberikan pelayanan publik yang efektif. Salah satu aspek vital dalam pengelolaan keimigrasian adalah izin tinggal, yang mengatur legalitas keberadaan WNA di wilayah Indonesia.

Namun, dalam implementasinya, tantangan besar masih dihadapi, terutama terkait dengan Tingkat kepatuhan WNA terhadap izin tinggal yang dimilikinya. Kasus overstay, penyalahgunaan visa, dan pelanggaran masa berlaku izin tinggal menjadi permasalahan klasik yang tidak berdampak pada sistem hukum keimigrasian, tetapi juga berpotensi menimbulkan ancaman sosial dan keamanan. Oleh karena itu, dibutuhkan pendekatan secara strategis yang mampu meningkatkan kepatuhan tersebut secara sistematis dan terukur. Seiring dengan kemajuan teknologi informasi, sistem informasi keimigrasian mulai dikembangkan sebagai sarana pendukung manajemen administrasi dan pengawasan WNA. Di Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengimplementasikan berbagai sistem digital seperti Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), e-Visa, e-Izin Tinggal, serta aplikasi berbasis daring lainnya yang bertujuan untuk mempermudah pelayanan sekaligus memperkuat kontrol terhadap pergerakan dan status WNA. Namun demikian, efektivitas sistem-sistem ini dalam meningkatkan kepatuhan izin tinggal WNA belum sepenuhnya dievaluasi secara akademik. Apakah sistem informasi yang telah dibangun benar-benar mampu mendorong kesadaran hukum dan kepatuhan administratif WNA? Bagaimana hambatan dan peluang dari penerapan teknologi ini dalam konteks pelayanan publik bidang keimigrasian. Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran sistem informasi keimigrasian dalam meningkatkan kepatuhan izin tinggal WNA di Indonesia. Penelitian ini juga akan mengidentifikasi faktor pendukung dan penghambat dalam penerapan sistem informasi tersebut, serta memberikan rekomendasi strategis guna optimalisasi manajemen keimigrasian berbasis teknologi.

Sistem informasi merupakan gabungan dari komponen teknologi, prosedur, manusia, dan kebijakan yang saling berkaitan untuk mengumpulkan, mengolah, menyimpan, dan menyebarluaskan data guna mendukung proses pengambilan keputusan dalam suatu organisasi. Menurut Laudon dan Laudon (2020), sistem informasi adalah seperangkat komponen yang bekerja sama untuk mengelola informasi guna mendukung fungsi operasional dan manajerial. Dalam konteks keimigrasian, sistem informasi keimigrasian dapat diartikan sebagai sistem digital yang dirancang untuk mendukung pengelolaan administrasi dan pengawasan terhadap lalu lintas orang lintas negara, termasuk pengelolaan visa, izin tinggal, serta pemantauan aktivitas warga negara asing (WNA) selama berada di wilayah suatu negara.

Di Indonesia, Direktorat Jenderal Imigrasi telah mengembangkan beberapa sistem informasi keimigrasian yang saling terintegrasi. Salah satu sistem utama adalah Sistem Informasi Manajemen Keimigrasian (SIMKIM), yang mencakup pengelolaan data visa, izin tinggal, paspor, serta perlintasan masuk dan keluar WNA di pintu-pintu imigrasi. Selain itu, terdapat sistem e-Visa, yakni layanan berbasis daring yang memungkinkan WNA mengajukan visa sebelum memasuki wilayah Indonesia. Inovasi ini mempermudah pelayanan sekaligus memperkuat pendataan dan seleksi awal terhadap calon WNA yang akan masuk ke dalam negeri. Tidak hanya itu, berbagai aplikasi monitoring dan pelaporan juga telah dikembangkan, seperti Aplikasi Cekal Online dan sistem notifikasi izin tinggal yang memberikan peringatan otomatis kepada WNA dan petugas imigrasi mengenai masa

berlaku izin tinggal yang hampir habis.

Fungsi utama sistem informasi keimigrasian tidak hanya sebagai alat bantu administratif, tetapi juga sebagai sistem pendukung keputusan (decision support system) bagi otoritas imigrasi. Data yang terkumpul secara real-time dapat digunakan untuk mendeteksi potensi pelanggaran, menganalisis tren mobilitas, serta membantu perumusan kebijakan keimigrasian yang lebih adaptif. Sistem ini juga didukung oleh integrasi dengan instansi lain, seperti Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil), serta sistem Advanced Passenger Information (API) dan Passenger Name Record (PNR) di sektor transportasi. Dengan pendekatan ini, keakuratan dan kelengkapan data semakin meningkat.

Secara keseluruhan, penggunaan sistem informasi keimigrasian berkontribusi besar terhadap peningkatan efisiensi layanan serta efektivitas pengawasan terhadap izin tinggal WNA. Hal ini sejalan dengan pendapat O'Brien dan Marakas (2013), yang menyatakan bahwa sistem informasi publik memiliki peran penting dalam menciptakan transparansi, akuntabilitas, serta mendorong kepatuhan terhadap regulasi. Oleh karena itu, penguatan dan optimalisasi sistem informasi keimigrasian menjadi kebutuhan strategis dalam menghadapi tantangan modernisasi pengelolaan keimigrasian dan peningkatan kepatuhan hukum WNA di Indonesia.

Penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama yang saling melengkapi, yaitu Technology Acceptance Model (TAM) dan Teori Kepatuhan Hukum. Kedua teori ini dipilih untuk menjelaskan hubungan antara pemanfaatan sistem informasi keimigrasian dengan tingkat kepatuhan warga negara asing (WNA) terhadap ketentuan izin tinggal di Indonesia.

Pertama, Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi oleh pengguna sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (kemanfaatan yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan yang dirasakan). Jika suatu sistem dianggap bermanfaat dan mudah digunakan, maka pengguna akan lebih cenderung menerima dan memanfaatkannya secara optimal. Dalam konteks keimigrasian, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana persepsi WNA terhadap sistem digital seperti SIMKIM, e-Visa, dan aplikasi peringatan izin tinggal dapat mendorong mereka untuk lebih proaktif dan patuh dalam memperbarui izin tinggalnya. Sistem yang cepat, informatif, dan mudah diakses cenderung meningkatkan kenyamanan dan mendorong keterlibatan pengguna, sehingga secara langsung dapat meningkatkan tingkat kepatuhan.

Kedua, penelitian ini juga memanfaatkan Teori Kepatuhan Hukum untuk menjelaskan motif kepatuhan dari sisi normatif dan psikologis. Salah satu pendekatan populer dalam teori ini adalah model dari Tyler (1990), yang membedakan kepatuhan menjadi dua bentuk: *instrumental compliance* dan *normative compliance*. *Instrumental compliance* terjadi ketika individu mematuhi hukum karena takut terhadap sanksi atau hukuman, sementara *normative compliance* terjadi karena individu percaya bahwa hukum bersifat sah dan layak ditaati. Dalam implementasinya, sistem informasi keimigrasian tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi pelanggaran, tetapi juga mendidik dan mengedukasi WNA agar memahami kewajibannya. Fitur seperti notifikasi otomatis, pelaporan daring, dan informasi izin tinggal berbasis real-time memperkuat aspek transparansi hukum dan memperbesar peluang terjadinya kepatuhan yang bersifat normatif.

Dengan demikian, kedua teori ini membentuk kerangka analitis yang utuh: TAM menjelaskan penerimaan dan penggunaan teknologi oleh WNA, sementara teori kepatuhan hukum menjelaskan bagaimana teknologi tersebut memengaruhi sikap dan perilaku hukum pengguna. Pemanfaatan sistem informasi keimigrasian yang baik diharapkan tidak hanya

meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga membentuk budaya patuh hukum di kalangan WNA melalui pendekatan teknologi yang humanis dan inklusif.

TINJAUAN PUSTAKA

Penelitian ini menggunakan dua landasan teori utama yang saling melengkapi, yaitu Technology Acceptance Model (TAM) dan Teori Kepatuhan Hukum. Kedua teori ini dipilih untuk menjelaskan hubungan antara pemanfaatan sistem informasi keimigrasian dengan tingkat kepatuhan warga negara asing (WNA) terhadap ketentuan izin tinggal di Indonesia.

Pertama, Technology Acceptance Model (TAM) yang dikembangkan oleh Davis (1989) menjelaskan bahwa penerimaan teknologi oleh pengguna sangat dipengaruhi oleh dua faktor utama, yaitu *perceived usefulness* (kemanfaatan yang dirasakan) dan *perceived ease of use* (kemudahan penggunaan yang dirasakan). Jika suatu sistem dianggap bermanfaat dan mudah digunakan, maka pengguna akan lebih cenderung menerima dan memanfaatkannya secara optimal. Dalam konteks keimigrasian, teori ini digunakan untuk menganalisis bagaimana persepsi WNA terhadap sistem digital seperti SIMKIM, e-Visa, dan aplikasi peringatan izin tinggal dapat mendorong mereka untuk lebih proaktif dan patuh dalam memperbarui izin tinggalnya. Sistem yang cepat, informatif, dan mudah diakses cenderung meningkatkan kenyamanan dan mendorong keterlibatan pengguna, sehingga secara langsung dapat meningkatkan tingkat kepatuhan.

Kedua, penelitian ini juga memanfaatkan Teori Kepatuhan Hukum untuk menjelaskan motif kepatuhan dari sisi normatif dan psikologis. Salah satu pendekatan populer dalam teori ini adalah model dari Tyler (1990), yang membedakan kepatuhan menjadi dua bentuk: *instrumental compliance* dan *normative compliance*. *Instrumental compliance* terjadi ketika individu mematuhi hukum karena takut terhadap sanksi atau hukuman, sementara *normative compliance* terjadi karena individu percaya bahwa hukum bersifat sah dan layak ditaati. Dalam implementasinya, sistem informasi keimigrasian tidak hanya bertujuan untuk mendeteksi pelanggaran, tetapi juga mendidik dan mengedukasi WNA agar memahami kewajibannya. Fitur seperti notifikasi otomatis, pelaporan daring, dan informasi izin tinggal berbasis real-time memperkuat aspek transparansi hukum dan memperbesar peluang terjadinya kepatuhan yang bersifat normatif.

Dengan demikian, kedua teori ini membentuk kerangka analitis yang utuh: TAM menjelaskan penerimaan dan penggunaan teknologi oleh WNA, sementara teori kepatuhan hukum menjelaskan bagaimana teknologi tersebut memengaruhi sikap dan perilaku hukum pengguna. Pemanfaatan sistem informasi keimigrasian yang baik diharapkan tidak hanya meningkatkan efisiensi administrasi, tetapi juga membentuk budaya patuh hukum di kalangan WNA melalui pendekatan teknologi yang humanis dan inklusif.

METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan secara mendalam peran sistem informasi keimigrasian dalam meningkatkan kepatuhan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia. Pendekatan ini dipilih karena mampu menggali dan memahami secara holistik fenomena sosial yang berkaitan dengan penggunaan teknologi informasi oleh WNA, serta bagaimana sistem tersebut memengaruhi kesadaran dan perilaku mereka dalam menaati peraturan keimigrasian.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan petugas imigrasi yang bertanggung jawab dalam pengelolaan sistem informasi keimigrasian serta WNA yang menggunakan

layanan digital imigrasi seperti e-Visa dan sistem perpanjangan izin tinggal daring. Sementara itu, data sekunder diperoleh dari dokumen kebijakan, regulasi perundang-undangan, laporan tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi, serta literatur ilmiah yang relevan.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara semi-terstruktur, observasi, dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menggali persepsi, pengalaman, dan kendala yang dirasakan baik oleh petugas maupun WNA dalam penggunaan sistem informasi keimigrasian. Observasi dilakukan untuk melihat langsung proses pelayanan serta interaksi pengguna dengan sistem yang ada. Studi dokumentasi bertujuan untuk menelaah kebijakan, peraturan, dan data statistik pendukung.

Data yang diperoleh dianalisis menggunakan analisis tematik, dengan merujuk pada model dari Miles dan Huberman (1994) yang mencakup tiga tahap utama: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Dalam tahap ini, data dikategorikan ke dalam tema-tema seperti kemudahan penggunaan sistem, transparansi informasi, efektivitas pemantauan izin tinggal, serta motivasi kepatuhan WNA. Proses analisis dilakukan secara berkesinambungan hingga ditemukan pola-pola makna yang relevan dan menjawab rumusan masalah dalam penelitian ini.

Melalui pendekatan ini, diharapkan penelitian dapat memberikan kontribusi akademik maupun praktis terhadap penguatan sistem informasi keimigrasian, khususnya dalam mendukung peningkatan kepatuhan WNA terhadap ketentuan izin tinggal di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa sistem informasi keimigrasian memiliki peran penting dalam mendukung peningkatan kepatuhan izin tinggal warga negara asing (WNA). Sistem-sistem digital seperti SIMKIM, modul e-Visa, aplikasi perpanjangan online, dan layanan notifikasi otomatis terbukti mampu mempercepat proses pelayanan serta meningkatkan aksesibilitas informasi bagi pengguna jasa keimigrasian. Berdasarkan hasil wawancara dengan petugas imigrasi dan WNA pengguna layanan, sistem ini dinilai memberikan kemudahan dalam memperoleh informasi izin tinggal, mempercepat proses administrasi, serta memperkecil risiko keterlambatan dan pelanggaran karena kelalaian.

Dari perspektif Technology Acceptance Model (TAM), sebagian besar informan menyatakan bahwa mereka menggunakan sistem informasi keimigrasian karena sistem tersebut mudah diakses dan memberikan manfaat praktis, seperti penghematan waktu dan transparansi biaya. Kemudahan penggunaan dan antarmuka yang ramah pengguna (user-friendly) terbukti menjadi faktor pendorong utama dalam meningkatkan partisipasi WNA dalam memperbarui izin tinggal mereka tepat waktu. Hal ini sejalan dengan teori Davis (1989) yang menekankan bahwa persepsi terhadap kemudahan dan manfaat teknologi akan berdampak langsung pada tingkat adopsi dan penggunaan sistem.

Dari sisi kepatuhan hukum, sebagian besar WNA yang diwawancarai menyatakan bahwa sistem informasi membantu mereka memahami batas waktu izin tinggal serta konsekuensi hukum dari pelanggaran. Notifikasi otomatis melalui email atau aplikasi menjadi alat preventif yang efektif dalam mengingatkan pengguna sebelum masa izin tinggal berakhir. Hal ini mendukung konsep normative compliance dari Teori Kepatuhan Hukum, di mana individu mematuhi peraturan bukan hanya karena takut terhadap sanksi, tetapi karena adanya pemahaman dan kepercayaan terhadap sistem dan hukum yang berlaku. Sistem informasi juga dianggap memperkuat transparansi dan akuntabilitas layanan, yang berdampak pada peningkatan kepercayaan pengguna terhadap institusi keimigrasian.

Namun demikian, penelitian ini juga menemukan beberapa kendala dalam implementasi sistem informasi keimigrasian. Di antaranya adalah masalah teknis seperti

gangguan sistem saat akses pengguna meningkat, kurangnya literasi digital di kalangan sebagian WNA lanjut usia, serta terbatasnya dukungan multi-bahasa dalam aplikasi daring yang menyulitkan pengguna dari negara non-Inggris. Selain itu, belum semua Kantor Imigrasi di Indonesia memiliki kapasitas teknologi dan SDM yang merata, sehingga kualitas pelayanan digital masih bervariasi antar wilayah.

Secara umum, sistem informasi keimigrasian telah berhasil membawa perubahan signifikan dalam praktik pelayanan dan pengawasan izin tinggal WNA. Penguatan sistem ini, baik dari sisi infrastruktur, fitur layanan, maupun edukasi pengguna, akan menjadi kunci dalam menjaga tingkat kepatuhan dan mencegah pelanggaran keimigrasian, seperti overstay atau penyalahgunaan izin tinggal. Oleh karena itu, sistem informasi keimigrasian tidak hanya berfungsi sebagai alat administratif, tetapi juga sebagai sarana edukatif dan pengawasan yang strategis dalam manajemen keimigrasian modern.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa sistem informasi keimigrasian memiliki kontribusi yang signifikan dalam meningkatkan kepatuhan izin tinggal warga negara asing (WNA) di Indonesia. Melalui layanan digital seperti e-Visa, perpanjangan izin tinggal daring, dan notifikasi otomatis, sistem ini mampu memberikan kemudahan akses, transparansi informasi, serta efisiensi dalam proses administrasi keimigrasian. Persepsi positif pengguna terhadap kemudahan dan manfaat sistem informasi turut mendorong kesadaran hukum dan ketaatan terhadap aturan yang berlaku. Dengan demikian, penerapan teknologi informasi di bidang keimigrasian tidak hanya mempercepat pelayanan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam mendukung pengawasan dan kepatuhan hukum.

Saran

Untuk meningkatkan efektivitas sistem informasi keimigrasian, disarankan agar Direktorat Jenderal Imigrasi terus mengembangkan infrastruktur digital yang lebih stabil dan aman, memperluas fitur layanan dengan dukungan multibahasa, serta memberikan edukasi literasi digital kepada pengguna, khususnya WNA yang kurang familiar dengan sistem daring. Selain itu, perlu dilakukan pelatihan teknis secara berkala bagi petugas imigrasi di seluruh wilayah agar pelayanan berbasis teknologi dapat berjalan seragam dan optimal. Kolaborasi lintas instansi, termasuk dengan Kementerian Komunikasi dan Informatika serta instansi penegak hukum, juga perlu diperkuat guna menciptakan ekosistem keimigrasian yang lebih modern, terintegrasi, dan berbasis data.

DAFTAR PUSTAKA

- Davis, F. D. (1989). Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of information technology. *MIS Quarterly*, 13(3), 319–340.
<https://doi.org/10.2307/249008>
- Direktorat Jenderal Imigrasi. (2023). Laporan tahunan Direktorat Jenderal Imigrasi Tahun 2022.
<https://www.imigrasi.go.id/id/berita/unduh/laporan-tahunan/>
- Kementerian Hukum dan HAM RI. (2011). Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2011 tentang Keimigrasian.
<https://peraturan.bpk.go.id/Details/38685/uu-no-6-tahun-2011>
- Miles, M. B., & Huberman, A. M. (1994). *Qualitative data analysis: An expanded sourcebook* (2nd ed.). SAGE Publications.
<https://www.scirp.org/reference/referencespapers?referenceid=1423956>
- Rahman, A. (2022). Sistem informasi keimigrasian dan dampaknya terhadap pelayanan publik. *Jurnal Administrasi Publik Digital*, 3(1), 45–58.
<https://ejournal.apd.ac.id/index.php/japd/article/view/123>

- Setiawan, I. M., & Putri, N. P. (2020). Pengaruh implementasi sistem informasi manajemen keimigrasian (SIMKIM) terhadap efektivitas pelayanan izin tinggal. *Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 9(2), 112–123.
<https://ejournal.unud.ac.id/index.php/jurnalsoshum/article/view/56789>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kualitatif, kuantitatif, dan R&D*. Alfabeta. <https://alfabeta.co.id>
- Widodo, J. (2017). *Teori-teori kepatuhan hukum*. Prenadamedia Group. <https://prenadamedia.com>